



**PENGARUH SIZE, WEALTH, LEVERAGE DAN  
INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI  
JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh  
Ratna Ayu Minarsih  
NIM 7211411074**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Senin

Tanggal : 6 Juli 2015


Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Fachrurrozie, M.Si.  
NIP. 196206231989011001

Pembimbing



Drs. Subowo, M.Si.  
NIP. 195504161984031033

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2015

Penguji I



Amir Mahmud, S. Pd, M. Si  
NIP. 197212151998021001

Penguji II



Henny Murtini, SE, M.Si  
NIP. 198112222009031000

Penguji III



Drs. Subowo, M. Si  
NIP. 195504161984031033

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Wahyono, M. M  
NIP. 195601031983121001

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Juli 2015

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to read 'Ratna Ayu Minarsih'.

Ratna Ayu Minarsih  
NIM 7211411074

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain (Q.S. Al-Insyirah: 6-7)
- ❖ Yang telah terjadi memang tak bisa diubah, tapi yang belum terjadi masih bisa diusahakan.

### **PERSEMBAHAN :**

- \* Bapak dan Ibuku tercinta yang senantiasa mengiringi langkahku dan menyebut namaku dalam doanya.
- \* Adikku Dian tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
- \* Sahabat-sahabatku tersayang (Rika, Rifka, Ucik) yang selalu memotivasi dan selalu menemani dalam sedih maupun senang.
- \* Arga, Riska, Ghani, Nadia dan Adin yang telah memberikan semangat dan bantuanya.
- \* Keluarga kecil di Beautiful House Kost.
- \* Sahabat-sahabat Akuntansi B 2011.

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh *Size, Wealth, Leverage* dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah” dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti program S1 di Fakultas Ekonomi.
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi.
4. Amir Mahmud, S.Pd, M.Si, Dosen Wali Jurusan Akuntansi B 2011 yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.

5. Drs. Subowo, M. Si, selaku Dosen Pembimbing sekaligus Penguji 3 yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
6. Amir Mahmud, S. Pd, selaku Penguji 1 yang telah memberikan masukan dan penilaian terhadap penelitian ini.
7. Henny Murtini, SE, M. Si, selaku Penguji 2 yang telah memberikan masukan dan penilaian terhadap penelitian ini.
8. Semua dosen dan staff tata usaha yang telah membantu kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
9. Orang tua tercinta, Bapak Burhanuddin dan Ibu Sumarsih serta Adikku Dian, terima kasih atas doa yang dipanjatkan, serta dukungan, semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
10. Seluruh kerabat, sahabat, teman dan pihak-pihak yang sudah membantu dan mendoakan namum tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Semarang, Juli 2015



Penulis

## SARI

**Minarsih, Ratna Ayu.** 2015. “Pengaruh *Size, Wealth, Leverage* dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah”. Skripsi. Jurusan Akuntansi S1. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Subowo, M. Si.

**Kata Kunci:** *Size, Wealth, Leverage, Intergovernmental Revenue, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.*

Otonomi daerah bertujuan untuk mengutamakan pada sistem demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, masih ada daerah otonom di Jawa Tengah yang belum berjalan dengan baik dalam prinsip efisiensi dan efektivitas otonomi daerah. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh *size, wealth, leverage* dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jumlah populasi yang diobservasi yaitu 47 pemerintah daerah. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan dua model regresi. Model pertama adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efisiensi. Model kedua adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efektivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable *size, wealth, leverage* dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah secara parsial untuk rasio efisiensi. Sedangkan untuk model kedua, hanya variable *leverage* dan *intergovernmental revenue* yang berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk rasio efektivitas.

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio efisiensi kinerja pemerintah daerah berada pada kategori kurang efisien. Sedangkan dengan menggunakan rasio efektivitas kinerja pemerintah daerah berada pada kategori sangat efektif. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangannya sampai semaksimal mungkin sehingga mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal.



## ABSTRACT

**Minarsih, RatnaAyu.** 2015. "The Influence of Size, Wealth, Leverage and Intergovernmental Revenue toward the Financial Performance of Local Government in Central Java". Final Project. S1 degree of Accounting Department. Faculty Of Economics. Semarang State University. Advisor Drs. Subowo, M.Si.

**Keywords: Size, Wealth, Leverage, Intergovernmental Revenue, The Financial Performance of Local Government.**

Local autonomy aims to give priority to the democratic system and improves people's welfare. However, in practice, there are still autonomous local in Central Java that has not run well in the principles of efficiency and effectiveness of local autonomy. The performance measurement is the one way that can be used by the local government in achieving good governance. The study is conducted with the purpose of acquiring empirical evidence related to the influence of size, wealth, leverage and intergovernmental revenue toward the financial performance of the local government in Central Java.

The population in this research was the local government in Central Java. The total sample observed are 47 local governments. The technique analysis used is the multiple linear regression which used two model of regressions. The first model was the local government financial performance which was measured by the ratio of efficiency. The second model is the local government financial performance which is measured by the ratio of effectiveness.

The research result showed that the variable of size, wealth, leverage and intergovernmental revenue would not affect the financial performance of the local government in Central Java partially for the ratio of efficiency. While for the second model, only leverage and intergovernmental revenue variable that influenced partially toward the financial performance of the local government in Central Java for the ratio of effectiveness.

The conclusions that can be drawn from this research are the financial performance of the local government which uses the ratio of efficiency local government performance falls into the less efficient category. While the one which uses the ratio of the effectiveness falls into the very effective category. Local government are expected to continue to improve and enhance the performance of financial to the greatest extent possible so that was able to produce a more optimal performance.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA.....	vi
SARI .....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Teori Agensi.....	13
2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	16
2.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
2.4. Ukuran ( <i>Size</i> ) Pemerintah Daerah.....	24
2.5. Kemakmuran ( <i>Wealth</i> ).....	25
2.6. <i>Leverage</i> .....	27

2.7. <i>Intergovernmental Revenue</i> .....	28
2.8. Peneliti Terdahulu .....	30
2.9. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis .....	34
2.9.1. Pengaruh Ukuran ( <i>Size</i> ) Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	34
2.9.2. Pengaruh Kemakmuran ( <i>Wealth</i> ) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	35
2.9.3. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	36
2.9.4. Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	37
2.9.5. Hipotesis .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis dan Desain Penelitian .....	39
3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .....	39
3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	40
3.3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	40
3.3.2. Ukuran ( <i>Size</i> ) Pemerintah Daerah .....	42
3.3.3. Kemakmuran ( <i>Wealth</i> ) .....	43
3.3.4. <i>Leverage</i> .....	43
3.3.5. <i>Intergovernmental Revenue</i> .....	44
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	46
3.5. Metode Analisis Data .....	46
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	46
3.5.2. Uji Asumsi Klasik .....	46
3.5.2.1. Uji Normalitas .....	47
3.5.2.2. Uji Multikolinearitas .....	48

3.5.2.3. Uji Autokorelasi.....	48
3.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas.....	49
3.5.3. Analisis Regresi Berganda.....	50
3.5.4. Pengujian Hipotesis.....	52
3.5.4.1. Uji Statistik F (Uji F).....	52
3.5.4.2. Uji Regresi Parsial (Uji t).....	52
3.5.4.3. Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....	53

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian.....	54
4.1.1. Deskriptif Objek Penelitian.....	54
4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif.....	55
4.1.2.1. Deskriptif Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Rasio Efisiensi.....	57
4.1.2.2. Deskriptif Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Rasio Efektivitas.....	59
4.1.2.3. Deskriptif Ukuran ( <i>Size</i> ) Pemerintah Daerah.....	61
4.1.2.4. Deskriptif Kemakmuran ( <i>Wealth</i> ) Pemerintah Daerah.....	62
4.1.2.5. Deskriptif <i>Leverage</i> .....	63
4.1.2.6. Deskriptif <i>Intergovernmental Revenue</i> .....	63
4.1.3. Pengujian Asumsi Klasik.....	64
4.1.3.1. Uji Normalitas.....	65
4.1.3.2. Uji Multikolinearitas.....	67
4.1.3.3. Uji Autokorelasi.....	69
4.1.3.4. Uji Heteroskedastisitas.....	70
4.1.4. Analisis Regresi Berganda.....	72
4.1.4.1. Persamaan Regresi.....	72
4.1.4.2. Uji Statistik F (Uji F).....	75

4.1.4.3. Uji Parsial (Uji-t) .....	77
4.1.4.4. Analisis Koefisien Determinasi .....	80
4.2. Pembahasan.....	81
4.2.1. Pengaruh Ukuran ( <i>Size</i> ) Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	82
4.2.2. Pengaruh Kemakmuran ( <i>Wealth</i> ) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	83
4.2.3. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	84
4.2.4. Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	86
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Simpulan .....	89
5.2. Keterbatasan.....	91
5.3. Saran .....	92
5.3.1. Saran Bagi Pihak Pemerintah .....	92
5.3.2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	94
<b>LAMPIRAN</b> .....	98

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1. Realisasi Belanja Pegawai dan Realisasi Pengeluaran (Belanja) tahun 2012 .....	5
Tabel 1.2. Realisasi Belanja Pegawai dan Realisasi Pengeluaran (Belanja) tahun 2013 .....	6
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 3.1. Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah .....	41
Tabel 3.2. Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah .....	42
Tabel 3.3. Definisi Variabel Operasional .....	45
Tabel 4.1. Perincian Total Populasi 2012-2013 .....	54
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 4.3. Statistik Deskriptif Efisiensi .....	57
Tabel 4.4. Data Distribusi Frekuensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk Rasio Efisiensi.....	58
Tabel 4.5. Statistik Deskriptif Efektivitas .....	59
Tabel 4.6. Data Distribusi Frekuensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk Rasio Efektivitas .....	60
Tabel 4.7. Statistik Deskriptif <i>Size</i> .....	61
Tabel 4.8. Statistik Deskriptif <i>Wealth</i> .....	62
Tabel 4.9. Statistik Deskriptif <i>Leverage</i> .....	63
Tabel 4.10. Statistik Deskriptif <i>Intergovernmental Revenue</i> .....	64
Tabel 4.11. Hasil Uji Normalitas Model 1 .....	66
Tabel 4.12. Hasil Uji Normalitas Model 2 .....	67
Tabel 4.13. Hasil Uji Multikolinearitas Model 1 .....	68
Tabel 4.14. Hasil Uji Multikolinearitas Model 2 .....	68

Tabel 4.15. Hasil Uji Autokorelasi Model 1 .....	69
Tabel4.16. Hasil Uji Autokorelasi Model 2 .....	70
Tabel 4.17. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1 .....	71
Tabel 4.18. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2 .....	72
Tabel 4.19. Hasil Regresi Model 1 .....	73
Tabel 4.20. Hasil Regresi Model 2 .....	74
Tabel 4.21. Hasil Uji Statistik F Model 1 .....	76
Tabel 4.22. Hasil Uji Statistik F Model 1 .....	76
Tabel4.23. Hasil Uji Statistik t Model 1 .....	77
Tabel 4.24. Hasil Uji Statistik t Model 2 .....	79
Tabel 4.25. Hasil Koefisien Determinasi Model 1 .....	80
Tabel 4.26. Hasil Koefisien Determinasi Model 2 .....	81

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis .....	34
Gambar 4.1. Uji <i>Probability Normalitas</i> (Efisiensi).....	65
Gambar 4.2. Uji <i>Probability Normalitas</i> (Efektivitas).....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Data <i>Size</i> Pemerintah Daerah Tahun 2012 .....	98
Lampiran 2 Data <i>Size</i> Pemerintah Daerah Tahun 2013 .....	99
Lampiran 3 Data <i>Wealth</i> Pemerintah Daerah Tahun 2012.....	100
Lampiran 4 Data <i>Wealth</i> Pemerintah Daerah Tahun 2013.....	101
Lampiran 5 Data <i>Leverage</i> Tahun 2012.....	102
Lampiran 6 Data <i>Leverage</i> Tahun 2013.....	103
Lampiran 7 Data <i>Intergovernmental Revenue</i> Tahun 2012 .....	104
Lampiran 8 Data <i>Intergovernmental Revenue</i> Tahun 2013 .....	105
Lampiran 9 Data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Rasio Efisiensi Tahun 2012 .....	106
Lampiran 10 Data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Rasio Efisiensi Tahun 2013 .....	107
Lampiran 11 Data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Rasio Efektivitas Tahun 2012.....	108
Lampiran 12 Data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Rasio Efektivitas Tahun 2013.....	109
Lampiran 13 Data Variabel Independen dan Variabel Dependen Tahun 2012 dan 2013.....	110
Lampiran 14 Detail Kategori Efisiensi dan Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2012.....	112
Lampiran 15 Detail Kategori Efisiensi dan Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2013 .....	113
Lampiran 16 Hasil Output SPSS .....	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Era otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian diganti menjadi UU No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berdasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi yaitu penyerahan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Puspitasari, 2013).

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan daerah sesuai dengan potensi lokal wilayahnya. Kedudukan pemerintah daerah terutama tingkat II (Kabupaten/Kota) dalam sistem otonomi daerah menjadi sangat penting karena akan berperan sebagai motor dalam pelaksanaan otonomi. Pemerintah daerah yang menguasai daerah yang lebih sempit daripada pemerintah pusat diharapkan sangat memahami kondisi dan permasalahan wilayahnya secara detail. Dengan demikian, pembangunan daerah

diharapkan akan berjalan dengan baik dan merata sampai pada wilayah-wilayah daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding dengan era sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (desentralisasi fiskal). Aspek kedua yaitu disisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah (Azhar, 2008).

Secara sempit, otonomi daerah berarti terjadinya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dengan pemenuhan azas akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan dana publik sangat menuntut adanya pengelolaan dana daerah yang bertanggungjawab. Optimalisasi pengelolaan dana publik diartikan bahwa daerah dituntut menggali sumber-sumber pendapatan daerah tersebut dengan memenuhi aspek efisiensi dan efektivitas (Azhar, 2008).

Adapun yang menjadi tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, mandiri dalam pembiayaan pembangunan dan meningkatkan peran serta masyarakat serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia (aparatur maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (financial), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat dan karakteristik ekologis.

Adapun misi utama Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan (Bisma, 2010). Selanjutnya Bastian (2006) menyatakan bahwa “untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.” Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan pemerintahan daerah yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuan untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerahnya (Janur, 2009).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sendiri dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat, sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada masyarakat berupa laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. Pemerintah tidak hanya mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari rakyat, tapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapainya (Indrawan, 2013). Sebagai implikasinya peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik (Halacmi, 2005). Menurut Mardiasmo (2004) inti dari pengukuran kinerja organisasi pemerintah daerah adalah *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pendekatan pengukuran kinerja, biasanya dinyatakan dengan ukuran tingkat ekonomis, efisien dan efektivitas. Ekonomis merupakan pengelolaan hati-hati tanpa ada pemborosan, sementara efisiensi adalah membandingkan antara jumlah *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan, serta efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan yang harus dicapai.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan, otonomi daerah bertujuan untuk mengutamakan pada sistem demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, masih ada daerah otonom yang belum berjalan dengan baik dalam prinsip efisiensi dan efektivitas otonomi daerah (m.republika.co.id, 2013). Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1. dan Tabel 1.2. mengenai realisasi penggunaan dana APBD untuk belanja pegawai pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2012 dan tahun 2013.

**Tabel 1.1.**  
**Realisasi Belanja Pegawai dan Realisasi Pengeluaran (Belanja) tahun 2012**

<b>NO</b>	<b>PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>REALISASI BELANJA PEGAWAI</b>	<b>REALISASI PENGELUARAN</b>	<b>%</b>
1	Kab. Banjarnegara	683.416.001.802	1.111.145.362.420	61,5
2	Kab. Banyumas	1.108.772.616.207	1.732.236.268.164	64,0
3	Kab. Batang	558.711.722.830	862.095.262.765	64,8
4	Kab. Blora	676.524.892.037	1.125.135.368.559	60,1
5	Kab. Boyolali	809.948.823.763	1.269.226.813.508	63,8
6	Kab. Brebes	908.851.954.164	1.440.489.255.759	63,1
7	Kab. Cilacap	1.039.705.299.140	1.714.292.820.908	60,6
8	Kab. Demak	590.987.384.980	1.207.868.073.642	48,9
9	Kab. Grobogan	749.901.302.406	1.202.191.202.867	62,4
10	Kab. Jepara	645.688.161.449	1.257.038.468.427	51,4
11	Kab. Karanganyar	801.659.515.236	1.173.205.689.050	68,3
12	Kab. Kebumen	920.785.376.856	1.360.050.874.821	67,7
13	Kab. Kendal	703.687.498.312	1.163.988.889.310	60,5
14	Kab. Klaten	1.016.532.289.910	1.439.619.163.409	70,6
15	Kab. Kudus	600.872.030.740	1.152.274.704.801	52,1
16	Kab. Magelang	784.645.795.924	1.146.500.040.357	68,4
17	Kab. Pati	862.418.265.710	1.421.939.819.540	60,7
18	Kab. Pekalongan	680.197.065.624	1.007.758.469.920	67,5
19	Kab. Pemasang	811.271.781.318	1.196.452.995.116	67,8
20	Kab. Purbalingga	626.985.745.053	1.084.087.067.123	57,8
21	Kab. Purworejo	778.533.685.180	1.126.130.839.860	69,1
22	Kab. Rembang	575.137.030.254	969.132.236.253	59,3
23	Kab. Semarang	698.331.117.434	1.178.648.713.546	59,2
24	Kab. Sragen	818.331.045.593	1.197.434.071.270	68,3
25	Kab. Sukoharjo	737.843.332.970	1.196.799.260.947	61,7
26	Kab. Tegal	795.933.830.488	1.040.313.802.171	76,5
27	Kab. Temanggung	573.485.889.464	912.679.965.882	62,8
28	Kab. Wonogiri	899.265.752.530	1.325.195.586.897	67,9
29	Kab. Wonosobo	548.377.710.033	986.536.912.888	55,6
30	Kota Magelang	327.277.632.103	536.348.689.402	61,0
31	Kota Pekalongan	296.853.462.462	538.563.581.728	55,1
32	Kota Salatiga	309.315.405.554	551.634.845.320	56,1
33	Kota Semarang	1.215.248.166.972	2.053.334.797.225	59,2
34	Kota Surakarta	698.386.775.009	1.145.170.897.101	61,0
35	Kota Tegal	338.011.092.458	586.687.294.770	57,6

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

**Tabel 1.2.**  
**Realisasi Belanja Pegawai dan Realisasi Pengeluaran (Belanja) tahun 2013**

<b>NO</b>	<b>PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>REALISASI BELANJA PEGAWAI</b>	<b>REALISASI PENGELUARAN</b>	<b>%</b>
1	Kab. Banjarnegara	725.744.493.529	1.175.474.028.855	61,7
2	Kab. Banyumas	1.181.577.521.238	2.018.052.963.730	58,6
3	Kab. Batang	614.822.878.032	1.031.360.905.401	59,6
4	Kab. Blora	778.872.858.636	1.318.484.054.214	59,1
5	Kab. Boyolali	865.383.487.830	1.421.830.961.424	60,9
6	Kab. Brebes	960.461.564.611	1.661.266.202.697	57,8
7	Kab. Cilacap	1.124.422.001.602	1.943.108.885.729	57,9
8	Kab. Demak	643.261.952.408	1.338.188.112.950	48,1
9	Kab. Grobogan	816.864.175.577	1.505.508.782.417	54,3
10	Kab. Jepara	730.231.125.993	1.302.020.962.393	56,1
11	Kab. Karanganyar	857.463.349.997	1.287.163.763.904	66,6
12	Kab. Kebumen	1.003.271.390.551	1.478.649.385.829	67,9
13	Kab. Kendal	779.007.265.882	1.270.620.865.836	61,3
14	Kab. Klaten	1.090.316.044.634	1.621.602.407.460	67,2
15	Kab. Kudus	673.760.090.838	1.155.490.615.349	58,3
16	Kab. Magelang	827.006.325.175	1.258.155.351.177	65,7
17	Kab. Pati	967.446.167.979	1.649.489.124.477	58,7
18	Kab. Pekalongan	727.898.687.170	1.223.169.683.250	59,5
19	Kab. Pemasang	873.645.960.310	1.477.106.031.341	59,1
20	Kab. Purbalingga	659.868.692.577	1.126.557.032.701	58,6
21	Kab. Purworejo	816.735.346.010	1.204.862.645.824	67,8
22	Kab. Rembang	633.858.409.334	1.060.648.437.288	59,8
23	Kab. Semarang	743.733.973.175	1.282.695.221.162	58,0
24	Kab. Sragen	878.329.164.497	1.408.595.385.453	62,4
25	Kab. Sukoharjo	790.071.373.196	1.281.648.110.545	61,6
26	Kab. Tegal	905.180.311.926	1.313.098.040.071	68,9
27	Kab. Temanggung	610.465.641.752	950.367.588.673	64,2
28	Kab. Wonogiri	942.787.429.634	1.449.245.447.657	65,1
29	Kab. Wonosobo	598.107.748.005	988.103.772.409	60,5
30	Kota Magelang	345.830.929.538	630.850.717.357	54,8
31	Kota Pekalongan	335.076.000.756	730.305.312.000	45,9
32	Kota Salatiga	326.682.673.013	529.237.634.485	61,7
33	Kota Semarang	1.290.880.031.132	2.473.490.609.437	52,2
34	Kota Surakarta	781.349.385.472	1.375.304.857.300	56,8
35	Kota Tegal	366.337.129.531	673.040.144.370	54,4

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Dari Tabel 1.1. dan Tabel 1.2. dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2013. Pertumbuhan belanja lebih banyak dinikmati oleh alokasi pegawai. Di 35 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah, belanja pegawai menghabiskan rata-rata lebih dari 50% anggaran (APBD). Fakta tersebut menunjukkan bahwa masih buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

Filosofi pengelolaan keuangan dalam pemerintahan adalah bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, bukan pegawai. Oleh karena itu, efektivitas keuangan harus jelas, yaitu untuk kemakmuran masyarakat. Wujudnya adalah daya beli masyarakat naik, masyarakat banyak yang bekerja dan punya penghasilan, pelayanan yang baik dan murah, serta masyarakat yang terjamin kesehatannya (semarang.solopos.com, 2014).

Halim (2004) mendefinisikan analisis kinerja keuangan sebagai usaha mengidentifikasi ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan.

Menurut Mardiasmo (2004) “pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”. Greiling (2005) mengungkapkan bahwa salah satu kunci sukses dari pembaruan dalam sektor publik adalah dengan melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tentunya diperlukan dalam setiap periode agar dapat menjelaskan tingkat keberhasilan dari kinerja tersebut. Pemerintah daerah sebagai



sebuah organisasi sektor publik menjadi salah satu objek yang perlu dinilai perkembangan kinerja keuangannya pada setiap periode.

Pengukuran kinerja merupakan elemen yang penting dalam rangka perbaikan kinerja dan evaluasi di masa mendatang (Surepno, 2013). Fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai beberapa hal, yaitu (1) Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan; (2) Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan; (3) Alat komunikasi dengan publik (Wood, 2005) dalam Sumarjo (2010).

Cohen (2006) melakukan penelitian pada pemerintah daerah di Yunani untuk menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel yang digunakan adalah *Gross Domestic Product*, populasi penduduk, variabel *real estate*, *tourist* dan *capital*. Sedangkan indikator rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio *Return on Equity*, *Return on Assets*, *profit margin*, *curren ratio*, *debt/equity*, *long term liabilities/total assets*, *assets turnover*, *operating revenues/total revenues* dan *operating revenues/operating expense*. Hasil dari penelitian Cohen (2006) menunjukkan bahwa *Gross Domestic Product*, populasi penduduk, *real estate*, *tourist* dan *capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan kesembilan rasio keuangan. Rasio profitabilitas yang dinyatakan dalam rasio *ROA*, *ROE* dan *profit margin* tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut dikarenakan profitabilitas sektor pemerintah berbeda dengan sektor swasta.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia telah dilakukan oleh Partiatry (2010) dengan menggunakan delapan variabel independen, yaitu *revenue*, *expenditur*, *real estate*, *capital*, *taxes*, *grant*, *population* dan *tourist*. Hasilnya menunjukkan bahwa pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu *revenue* dan *expenditure*.

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan oleh Rukmana (2013) dengan menggunakan tiga variabel yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial hanya pajak daerah dan dana perimbangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kusumawardani (2012) melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan empat variabel yang terdiri dari *size*, kemakmuran, ukuran legislatif dan *leverage*. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya *size* pemerintah daerah dan ukuran legislatif yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Kusumawardani (2012) tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) yang menggunakan variabel *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, *leverage* dan *intergovernmental revenue*. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari *size* pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu dalam penelitian Sumarjo (2010) juga

terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu *leverage* dan *intergovernmental revenue*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sumarjo (2010) dengan beberapa perbedaan. Perbedaan pertama, kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas. Kedua, periode untuk penelitian ini adalah tahun 2012 dan tahun 2013. Ketiga, cakupan wilayah dari penelitian ini adalah provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui perkembangan dari kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah pada setiap periode untuk tujuan perbaikan kinerja di masa mendatang. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Size*, *Wealth*, *Leverage* dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena latar belakang yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?

2. Apakah kemakmuran (*wealth*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?
4. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh ukuran (*size*) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.
2. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh kemakmuran (*wealth*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.
3. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.
4. Untuk memperoleh bukti ada tidaknya pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Peneliti

Memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

2. Untuk Akademisi

Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, selain itu dapat dijadikan bahan bacaan dan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan.

3. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan juga gambaran bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Agensi**

Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan atau kekuasaan (disebut prinsipal) dan yang menerima kewenangan (disebut agen). Dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni antara pihak atasan (sebagai prinsipal) dan pihak bawahan (sebagai agen). Teori tentang hubungan kedua pihak tersebut populer dikenal sebagai teori keagenan. Hubungan keagenan lebih sering dibahas dalam konteks manajemen perusahaan yang berorientasi bisnis.

Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Teori principal-agen menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang).

Eisenhardt (1989) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi, yaitu: (1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) Manusia memiliki daya pikir terbatas

mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*) dan (3) Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak menguntungkan kepentingan pribadinya. Hal ini menimbulkan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sedangkan agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Konflik akan terus meningkat karena prinsipal tidak dapat mengawasi aktivitas agen sehari-hari untuk memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan keinginan dari prinsipal.

Dalam organisasi sektor publik, khususnya di pemerintahan pusat dan daerah, secara sadar atau tidak, teori keagenan telah dipraktikkan. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan otonomi dan desentralisasi yang diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999. Di sana terjadi kekuasaan yang independen (meski tidak 100 persen independen) dalam pemerintahan daerah. Pada hakikatnya, tujuan adanya organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas barang atau sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya ini, pemerintah pusat tidak dapat melakukannya sendirian, maka pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya tersebut dikarenakan pemerintah pusat juga tidak memiliki dana yang cukup untuk alokasi

sumber daya. Oleh karena adanya keterbatasan dana tersebut, maka pembuatan anggaran diperlukan sebagai mekanisme yang penting untuk alokasi sumber daya.

Di dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran, muncul dua perspektif yang mengindikasikan aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif dan legislatif dengan eksekutif. Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan eksekutif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah principal (Halim dan Abdullah, 2006). Dalam hubungan dengan rakyat, pihak legislatif adalah agen yang membela kepentingan rakyat (prinsipal), akan tetapi, tidak ada kejelasan mekanisme dan pengaturan serta pengendalian dalam pendelegasian kewenangan rakyat terhadap legislatif. Hal inilah yang sering menyebabkan adanya distorsi anggaran yang disusun oleh legislatif sehingga anggaran tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumberdaya kepada masyarakat, melainkan cenderung mengutamakan *self-interest* para pihak legislatif tersebut.

Teori keagenan ini banyak memberikan dampak negatif yang berupa perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*). Hal ini terjadi tidak lepas dari kaitannya dengan masalah asimetri informasi. Pihak agen memiliki informasi keuangan yang lebih banyak daripada pihak prinsipal. Di sisi lain, pihak prinsipal pun dapat menggunakan kewenangannya/kekuasaannya untuk memenuhi kepentingan pribadi (*self-interest*) (sakinatantri.wordpress.com, 2015).



## 2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Suyono, 2010). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Susanti (2010) mendefinisikan laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelola sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak diluar manajemen mengetahui kondisi entitas tersebut. Yusuf (2010) mendefinisikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada *stakeholder* yang didalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran, Nota

Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca). Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja *financial* pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, LKPD yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja (Surepno, 2013).

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi kepada publik (Surepno, 2013). Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kepentingan sejumlah besar pemakai (Bastian, 2006).

Bastian (2006) menyebutkan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan umum dalam pemerintah daerah menyediakan informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan dan untuk mendemonstrasikan akuntabilitas entitas untuk sumber daya – sumber daya terpercaya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya *financial*;
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya;

3. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya;
4. Menyediakan informasi mengenai kondisi *financial* suatu entitas dan perubahan didalamnya;
5. Menyediakan informasi agregat yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal efisiensi dan pencapaian tujuan.

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai (Bastian, 2006). Terdapat empat karakteristik pokok, yaitu:

1. Dapat dipahami

Karakteristik utama kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan sektor publik adalah kemudahannya untuk dipahami pemakai.

2. Relevan

Informasi memiliki kualitas yang relevan apabila informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam menilai peristiwa masa lalu dan masa kini, atau masa depan.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan materialitas dan dapat diandalkan pemakainya.

#### 4. Dapat diperbandingkan

Dapat diidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas dari suatu periode ke periode lainnya.

Melihat besarnya manfaat dari laporan keuangan, maka pemerintah pusat menerbitkan aturan mengenai kewajiban Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang dituangkan dalam UU No. 17 tahun 2003. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 laporan keuangan yaitu meliputi:

##### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PP RI No. 24 Tahun 2005 laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komprehensif.

##### 2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (PP RI No. 24 Tahun 2005). Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang

- 3) Piutang pajak dan bukan pajak
- 4) Persediaan
- 5) Aset tetap
- 6) Kewajiban jangka panjang dan jangka pendek
- 7) Ekuitas

### 3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas dalam satu periode akuntansi dan saldo kas dan saldo setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran (PP RI No. 24 Tahun 2005).

### 4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas.

## **2.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Azhar, 2008). Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Hamzah, 2008). Menurut Halim (2004), “kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat

digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”.

Whittaker (1995) dalam *Government Performance and Result Act, A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement* menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga terjadi upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai tujuan dimasa mendatang (Bastian, 2006).

Penilaian/pengukuran kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (Sesotyaningtyas, 2012). Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktivitas pada organisasi sektor publik (Halachmi, 2005).

Menurut Mardiasmo (2004) pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada

akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, dimaksudkan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja dinilai sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Masyarakat tentunya tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada kualitas dan kuantitasnya (Mardiasmo, 2004). Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sesuatu yang memang penting untuk dilakukan. Pengukuran kinerja juga merupakan salah satu kunci sukses dari pembaruan dalam sektor publik (Greiling, 2005).

Untuk mengetahui prestasi sebuah organisasi tertentu memerlukan ukuran atau kriteria sebagai indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Menurut Halim (2004), didalam penilaian indikator kinerja sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu, (1) Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBD, (2) Efisiensi biaya, (3) Efektivitas program, (4) Pemerataan dan keadilan.

Menurut Mahsun (2006) dalam konteks pemerintahan sebagai sektor publik, ada beberapa aspek yang dapat dinilai kinerjanya:

1. Kelompok Masukan ( *Input* )
2. Kelompok Proses ( *Proccess* )
3. Kelompok Keluaran ( *Output* )
4. Kelompok Hasil ( *Outcome* )
5. Kelompok Manfaat ( *Benefit* )
6. Kelompok Dampak ( *Impact* ).

Fokus pengukuran kinerja sektor publik justru terletak pada *outcome* dan bukan *input* dan proses, *outcome* yang dimaksudkan adalah *outcome* yang dihasilkan oleh individu ataupun organisasi secara keseluruhan, *outcome* harus mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi sektor publik.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Suprpto, 2006). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi (Halim, 2004). Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain adalah sebagai berikut:

1. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.



## 2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

### **2.4. Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah**

Penelitian yang dilakukan Suhardjanto et al. (2010) mengacu pada Patrick (2007) dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan mengambil dua komponen, yaitu struktur organisasi dan lingkungan eksternal. Patrick (2007) menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan struktur organisasi. Ukuran (*size*) pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut (Suhardjanto, Hartoko, Retnoningsih, Rusmin dan Brown, 2010).

Sumarjo (2010) melakukan penelitian mengenai ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset. Hasil dari penelitiannya menunjukkan secara empiris bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Sumarjo (2010) tersebut dapat diasumsikan bahwa semakin besar nilai total asetnya maka akan semakin besar ukuran pemerintah daerahnya. Tuntutan terhadap pemerintah yang mempunyai ukuran lebih besar akan lebih tinggi dari pada pemerintah yang mempunyai ukuran kecil. Hal ini akan memberikan dampak pada kinerja keuangannya. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin besar pula sumber daya yang dimiliki

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

## **2.5. Kemakmuran (*Wealth*)**

Kemakmuran (*wealth*) dari pemerintah daerah dapat dilihat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah, 2004). Adi (2006), mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah daerah tergantung PAD, karena PAD digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah dan pelayanan publik. Sumber dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari:

### **1. Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

### **2. Retribusi Daerah**

Yang dimaksud dengan retribusi menurut Halim (2004) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

Menurut Halim (2004), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1) bagian laba perusahaan milik daerah; 2) bagian laba lembaga keuangan bank; 3) bagian laba lembaga keuangan non bank; dan 4) bagaian laba atas penyertaan modal/investasi.

4. Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2004), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut: 1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; 2) penerimaan jasa giro; 3) penerimaan bunga deposito; 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi maka lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan asli daerahnya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah (belanja daerah) yang dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sehingga kinerjanya juga diharapkan semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) mengungkapkan bahwa daerah yang memiliki PAD yang tinggi maka memiliki sumber dana untuk menyelenggarakan pemerintahan sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik.

## 2.6. *Leverage*

*Leverage* berhubungan dengan penggunaan aktiva atau dana dimana penggunaan aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap atau beban tetap. Penelitian yang dilakukan Weill (2003) mengungkapkan bahwa *leverage* merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jika jumlah utang lebih besar daripada modal sendiri maka hal tersebut menggambarkan bahwa sumber utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal (Perwitasari, 2009).

Didalam sektor publik, rasio utang atau *leverage* sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio ini digunakan untuk bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini juga mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang dan harus dicari jalan untuk mengurangi utang (Sesotyaningtyas, 2012).

Utang daerah atau pinjaman daerah dapat bersumber dari:

1. Pemerintah pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri dan/atau penerusan pinjaman luar negeri.
2. Pemerintah daerah lain.

3. Lembaga keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lembaga keuangan bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah daerah yang memiliki *leverage* yang besar maka diprediksi memiliki tingkat resiko yang besar. Menurut Choiriyah (2010), *leverage* merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas. *Leverage* menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat terlihat tingkat resiko tidak tertagihnya utang (Perwitasari, 2010). Lebih lanjut, Perwitasari (2010), mengungkapkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki *leverage* tinggi maka memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utamanya berasal dari pihak eksternal.

## **2.7. *Intergovernmental Revenue***

*Intergovernmental revenue* adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick, 2007). *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto et al., 2010). Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil

(pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu:

1. Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah;
3. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta
4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.

Pada aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah ini (Elmi, 2002) mengungkapkan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan akan terjadi pembagian keuangan yang adil dan rasional. Artinya bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan yang jumlahnya lebih besar sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari DAU dan DAK (Julitawati, 2012).

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan membentuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melaksanakan fungsi pengawasan keuangan internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan fungsi pengawasan eksternal (Cahyat, 2004).

Dengan adanya dana suntikan dari pemerintah pusat, diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintahan di tingkat daerah. Dana ini dipergunakan untuk pendanaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pelayanan publik. Dengan adanya pelayanan publik yang memadai dan tepat sasaran membuktikan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik (Sesotyaningtyas, 2012).

## **2.8. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini merupakan ide dan pengetahuan dari penelitian terdahulu yang beragam. Tabel 2.1. berikut akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	Surepno (2013)	Pengaruh <i>Return on Equity (ROE)</i> , Ukuran ( <i>Size</i> ) dan Kemakmuran ( <i>Wealth</i> ) Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Indonesia	Variabel <i>ROE</i> , ukuran dan kemakmuran secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan untuk rasio efisiensi. Pada model kedua dengan menggunakan rasio efektivitas <i>ROE</i> dan kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan variable ukuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan rasio efektivitas. Secara simultan variable <i>ROE</i> , ukuran dan kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada kedua rasio efisiensi dan efektivitas.
2.	Media Kusumawardani (2012)	Pengaruh <i>Size</i> , Kemakmuran, Ukuran Legislatif dan <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	Variabel <i>size</i> dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Sedangkan kemakmuran dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
3.	Hendro Sumarjo (2010)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia)	Variabel ukuran ( <i>size</i> ) pemerintah daerah, <i>leverage</i> , dan <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variable Ukuran legislatif atau dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kemakmuran ( <i>wealth</i> ) dalam penelitian ini dinyatakan tidak

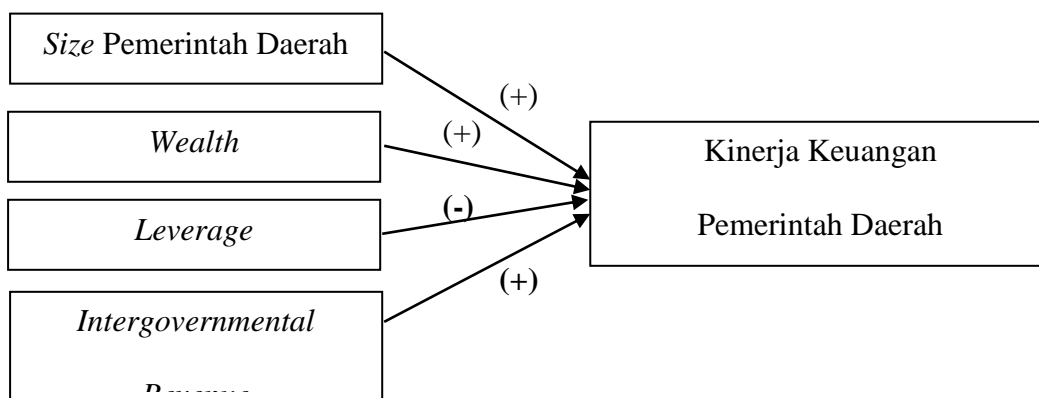


			terpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4.	Mirna Sesotyaningtyas (2012)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Ukuran Legislatif, <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa)	Secara simultan <i>variable leverage</i> , ukuran legislatif, <i>intergovernmental revenue</i> dan pendapatan pajak daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Sedangkan secara parsial, <i>leverage</i> , ukuran legislatif, <i>intergovernmental revenue</i> dan pendapatan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.
5.	Friska Sihite (2011)	Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatra Utara	Variabel PAD dan <i>fiscal stress</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan <i>variable</i> dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6.	Ebit Julitawati, Darwanis dan Jalauddin (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh.

7.	Cherry Dhia Wenny (2012)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Selatan	Variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Selatan.
8.	Wan Vidi Rukmana (2013)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Secara parsial pajak daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.
9.	Ratri Patriati (2010)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah	Variabel <i>revenue</i> dan <i>expenditure</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan <i>real estate</i> , <i>capital taxes</i> , <i>grant</i> , <i>population</i> dan <i>tourist</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## 2.9. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh *size*, *wealth*, *leverage* dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Size*, *wealth*, *leverage* dan *intergovernmental revenue* yang diduga akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**

### 2.9.1. Pengaruh Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

*Size* merupakan skala yang digunakan untuk menghitung nilai dan secara langsung akan menunjukkan besar kecilnya suatu objek dengan kapasitas tertentu, salah satunya yaitu pengukuran dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi *size* menjadi tolak ukur paling tepat untuk menilai sesuatu diantaranya yang berhubungan dengan materialitas (Surepno, 2013).

Tujuan utama dari program kerja pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang

baik, harus didukung oleh aktiva/aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut (Mustikarini dan Fitasari, 2012).

Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah dengan aset besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Tuntutan dalam kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki (Surepno, 2013).

Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Sumarjo (2010) bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah akan berdampak pada upaya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan kinerja yang baik. Karena tekanan yang besar dari publik akan mendorong sebuah organisasi untuk memberikan kinerja yang terbaik.

### **2.9.2. Pengaruh Kemakmuran (*Wealth*) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kemakmuran juga disebut sebagai wujud peningkatan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2001). Kemakmuran suatu daerah ditentukan dengan

besarnya nilai tambah yang tercipta berupa pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut. Kemakmuran suatu daerah dapat mendorong perbaikan infrastruktur daerah tersebut. Infrastruktur daerah yang baik akan meningkatkan investasi dalam daerah tersebut dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD merupakan sumber keuangan yang berasal dari setiap wilayah (Suhardjanto, 2010). Apabila jumlah pendapatan asli daerah meningkat, maka kebutuhan daerah tersebut akan terpenuhi untuk kemakmuran masyarakat. Peningkatan PAD hendaknya didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik (Adi, 2006). Kualitas pelayanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang baik.

### **2.9.3. Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

*Leverage* adalah perbandingan antara utang dan modal. Perwitasari (2010) telah melakukan penelitian pada sektor publik, hasilnya menunjukkan bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki oleh suatu entitas maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa entitas tersebut tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri sehingga membutuhkan dana dari pihak eksternal.

Beberapa penelitian mengenai *leverage* telah dilakukan oleh Sesotyaningtyas (2012) dan Perwitasari (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Weill (2003) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *leverage* dan pengukuran kinerja suatu entitas. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010)

mengenai *leverage* juga menunjukkan hal yang serupa dengan penelitian Weill (2003), yaitu *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **2.9.4. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

*Intergovernmental revenue* di Indonesia biasa dikenal dengan dana perimbangan. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat saat ini masih sangat besar (Surepno, 2013).

Pemberian dana perimbangan ini akan dipantau penggunaannya oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga diharapkan akan membuat pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pihak eksternal. Dengan demikian, semakin besar dana perimbangan akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

#### **2.9.5. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efisiensi

- H<sub>2</sub> : Ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efektivitas
- H<sub>3</sub> : Kemakmuran (*wealth*) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efisiensi
- H<sub>4</sub> : Kemakmuran (*wealth*) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efektivitas
- H<sub>5</sub> : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efisiensi
- H<sub>6</sub> : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efektivitas
- H<sub>7</sub> : *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efisiensi
- H<sub>8</sub> : *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efektivitas

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya yaitu menguji pengaruh ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), *leverage* dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012 dan tahun 2013.

#### **3.2. Populasi Penelitian**

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian (Rinduan dan Lestari, 1997). Sedangkan Arikunto (2002) menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan



masalah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian mengenai suatu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah baik pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Tengah. Karena populasi dalam penelitian ini memiliki anggota yang relatif kecil, maka data penelitian diambil selama dua tahun yaitu tahun 2012 dan tahun 2013.

### **3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), *leverage* dan *intergovernmental revenue*. Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **3.3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Rukmana, 2013).

Pengukuran variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini di proksikan dengan menggunakan rasio berikut:

### 1. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dan penerimaan daerah.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Adapun kriteria untuk menetapkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**

#### **Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100 % ke atas	Tidak Efisien
90 % - 100 %	Kurang Efisien
80 % - 90 %	Cukup Efisien
60 % - 80 %	Efisien
Dibawah 60 %	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

### 2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Adapun kriteria untuk menetapkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100 % ke atas	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
Dibawah 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.  
690.900.327 Tahun 1996

### 3.3.2. Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah

*Size* dapat diukur dengan jumlah karyawan, total aset, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991) dalam Suhardjanto, et al, (2010). Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) yaitu diproksikan dengan menggunakan total aset. Akan tetapi, dalam penelitian ini terdapat sedikit perbedaan dengan penelitian Sumarjo (2010), dimana ukuran pemerintah daerah diproksikan dengan logaritma natural dari total aset ((Ln) aktiva). Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing pemerintah daerah berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aset perlu di Ln kan. Pertimbangan pengukuran ini karena nilai aktiva lebih stabil dari pada nilai penjualan bersih dan kapitalisasi pasar (Wuryaningsih, 2002) dalam Sumarjo (2010).

### 3.3.3. Kemakmuran (*Wealth*)

Kemakmuran pemerintah daerah diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (Abdullah, 2004). PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari wilayah tersebut (Suhardjanto, 2010). Selain itu, dari semua jenis pendapatan (PAD, pendapatan antar pemerintah dan pendapatan hukum lainnya) hanya PAD tersedia dalam SKPD (Rosdini, 2008). Pertimbangan pengukuran dengan PAD ini karena meskipun kontribusi PAD kecil terhadap pemerintah daerah di Indonesia (sekitar 1% - 16%), PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari wilayah tersebut (Suhardjanto et al., 2010).

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

Kemakmuran dalam penelitian ini diproksikan dengan logaritma natural untuk menilai kemakmuran agar tidak terjadi perbedaan data yang terlalu ekstrem.

$$\text{Kemakmuran (wealth)} = \text{Ln (PAD)}$$

### 3.3.4. Leverage

*Leverage* merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan *debt to equity* dalam mengukur *leverage*. Semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin buruk kinerja. Sedangkan semakin rendah *leverage* maka semakin baik kinerja.

$$\textit{Debt to Equity} = \frac{\textit{Debt}}{\textit{Equity}}$$

### 3.3.5. *Intergovernmental Revenue*

*Intergovernmental revenue* di Indonesia biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto et al., 2010). Proksi dari *intergovernmental revenue* dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan. *Intergovernmental revenue* diukur dengan proksi yang sama dalam penelitian Sumarjo (2010). Pengukuran ini dipilih karena *intergovernmental revenue* merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari lingkungan eksternal (luar kota madya) dan besarnya ketergantungan pemerintah dari transfer pemerintah pusat (80%-98%) (Suhardjanto et al., 2010).

$$\textit{Intergovernmental Revenue} = \frac{\textit{Total Dana Perimbangan}}{\textit{Total Pendapatan}}$$

**Tabel 3.3.**  
**Definisi Variabel Operasional**

<b>No.</b>	<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Skala</b>	<b>Pengukuran</b>
1.	Rasio Efisiensi	Perbandingan antara <i>output</i> dan <i>input</i> atau realisasi pengeluaran dan penerimaan daerah	Rasio	Realisasi pengeluaran / realisasi penerimaan
2.	Rasio Efektivitas	Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah	Rasio	Realisasi Penerimaan PAD / Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah
3.	Ukuran ( <i>Size</i> )	Ukuran dari pemerintah daerah yang diukur melalui nilai total aset	Rasio	Total aset yang dimiliki pemerintah daerah
4.	Kemakmuran ( <i>Wealth</i> )	Kemakmuran dari pemerintah daerah yang diukur melalui nilai PAD	Rasio	Jumlah PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah)
5.	<i>Leverage</i>	Besarnya utang dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri.	Rasio	<i>Debt / Equity</i>
6.	<i>Intergovernmental Revenue</i>	Perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan	Rasio	Total dana perimbangan / total pendapatan

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran, 2006). Data sekunder ini terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012 dan tahun 2013. Data LKPD yang telah diaudit diperoleh dari *website* resmi Badan Pemeriksa Keuangan atau [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) dan untuk LKPD diperoleh langsung dari pihak BPK dikarenakan BPK sudah tidak mempublikasikan LKPD pada *website* resminya.

### **3.5. Metode Analisis Data**

#### **3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif terdiri dari perhitungan mean, median, standar deviasi, maksimum dan minimum dari masing-masing data sampel. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2011). Hal ini dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

#### **3.5.2. Uji Asumsi Klasik**

Untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian, maka harus dilakukan pengujian asumsi klasik pada normalitas, multikolinieritas, autokorelasi serta heterokedastisitas.

### 3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat bahwa suatu data berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji normalitas ini ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011). Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik normal probability plot dan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z* (1-Sample K-S).

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal *probability plot* adalah (Ghozali, 2011):

1. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z* (1-Sample K-S) adalah (Ghozali, 2011):

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.



### 3.5.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model, peneliti akan melihat *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF) dengan alat bantu program SPSS.

*Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cut-off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance*  $\geq 0,10$  atau sama dengan  $VIF \leq 10$ . Bila ternyata dalam model terdapat multikolinieritas, peneliti akan mengatasi hal tersebut dengan transformasi variabel. Transformasi variabel merupakan salah satu cara mengurangi hubungan linier diantara variabel independen. Transformasi dapat dilakukan dalam bentuk logaritma natural dan bentuk *first difference* atau delta (Ghozali, 2011).

### 3.5.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang saling berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data *cross section* (silang waktu), masalah auto korelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011).

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi penelitian ini menggunakan metode uji *Run test*. *Run test* merupakan bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Run test* adalah (Ghozali, 2011):

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti data residual terjadi secara tidak random (sistematis).
2. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti data residual terjadi secara random (acak).

#### **3.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi gejala heteroskedastisitas akan menimbulkan akibat varian koefisien regresi menjadi minimum dan *confidence interval* melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid lagi.

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat melalui hasil uji statistik. Uji statistik yang dilakukan adalah dengan menggunakan Uji Gletser. Dalam uji glejser, model regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya. Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel bebas. Apabila terdapat variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap residual absolut, maka terjadi heteroskedastisitas.

### **3.5.3. Analisis Regresi Berganda**

Dalam model penelitian ini terdapat satu variabel terikat yang berhubungan dengan empat variabel bebas sehingga analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing - masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara simultan (bersama-sama).

Hair *et al.* (1998) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Fleksibilitas dan adaptifitas dari metode ini mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat.

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda (*multiple regression analysis*), karena terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen (Sekaran, 2006). Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model 1:

$$EFI = \alpha + \beta_1 SIZE + \beta_2 WLTH - \beta_3 LEV + \beta_4 IR + e$$

Model 2:

$$EFEK = \alpha + \beta_1 SIZE + \beta_2 WLTH - \beta_3 LEV + \beta_4 IR + e$$

Keterangan

EFI	=	Rasio Efisiensi
EFEK	=	Rasio Efektivitas
SIZE	=	Ukuran Pemerintah Daerah
WLTH	=	Kemakmuran
LEV	=	<i>Leverage</i>
IR	=	<i>Intergovernmental Revenue</i>
$\alpha$	=	Konstan

$\beta_1, \beta_4$  = Koefisien Regresi

$e$  = *Error*

#### **3.5.4. Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), *leverage* dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Pengujian hipotesis meliputi:

##### **3.5.4.1. Uji Statistik F (Uji F)**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan dari model regresi linear berganda yang diajukan dapat diterima atau tidak. Uji F ini menggunakan alat analisis yaitu ANOVA (*Analysis of Variances*). Kriteria yang digunakan adalah *probability value (sig)*, apabila *probability value* dalam hasil pengujian lebih kecil dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model yang digunakan sudah tepat dan dapat diterima. Sebaliknya jika *probability value* lebih besar dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model yang digunakan ditolak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis ini.

##### **3.5.4.2. Uji Regresi Parsial (Uji Statistik t)**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel independen apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan menggunakan

*significance level* sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi (*p value*) > 0,05 maka secara individu variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikansi (*p value*) < 0,05 maka secara individu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### **3.5.4.3. Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

Merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinan dilihat pada hasil pengujian regresi berganda untuk variabel independen berupa ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), *leverage* dan *intergovernmental revenue* dan variabel dependen berupa rasio efisiensi dan efektivitas.

Karena variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu maka penulis menggunakan *Adjusted R Square* (*Adj R<sup>2</sup>*). Nilai  $R^2$  menunjukkan tingkat kemampuan semua variabel bebas untuk mempengaruhi variabel terikat, sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lain di luar variabel independen atau bebas. Dalam kenyataannya, nilai *Adjusted R Square* dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2011) jika dalam uji empiris didapat nilai *Adjusted R Square* negatif, maka nilai  $R^2 = 1$ , maka nilai *Adjusted R Square* =  $R^2$ , sedangkan jika nilai  $R^2 = 0$ , maka *Adjusted R Square* =  $(1-k)/(n-k)$ . jika  $k > 1$ , maka *Adjusted R Square* akan bernilai negatif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), *leverage* dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dikembangkan menjadi dua (2) model regresi yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan rasio efisiensi memiliki kinerja yang dapat dikatakan kurang efisien. Hal ini dapat dilihat pada populasi yang digunakan untuk data penelitian sebagian besar termasuk dalam kategori kurang efisien. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dianggap belum bijak dalam melakukan pengeluaran daerah. Kebanyakan pengeluaran daerah lebih didominasi digunakan untuk belanja pegawai daripada belanja modal untuk kepentingan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
2. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan rasio efektivitas memiliki kinerja yang dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini dapat dilihat pada populasi yang digunakan untuk data penelitian sebagian besar termasuk dalam kategori sangat efektif. Seluruh pemerintah daerah

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menjadi populasi dalam penelitian ini dianggap sudah mampu dalam merealisasikan PAD melebihi dari target yang telah ditentukan.

3. Ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik yang diukur dengan menggunakan rasio efisiensi maupun rasio efektivitas. Hal ini mengindikasikan bahwa peran total aset dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kebanyakan aset yang dimiliki pemerintah daerah adalah aset yang kurang produktif untuk meningkatkan daya saing daerah.
4. Kemakmuran (*wealth*) tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efisiensi karena secara statistik kemakmuran (*wealth*) memiliki arah yang berbeda dari hipotesis yang telah ditentukan diawal. Kemakmuran (*wealth*) juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada rasio efektivitas. Tidak berpengaruhnya kemakmuran (*wealth*) dikarenakan besarnya PAD dianggap masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan yang diberikan oleh pusat. Sehingga PAD memiliki kontribusi yang kecil dalam mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada rasio efisiensi. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang digunakan dalam penelitian sebagian besar hanya memiliki utang yang relatif kecil jika dibandingkan dengan modal sendiri.



*Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada rasio efektivitas. Dari perbedaan hasil pada kedua model tersebut dapat disimpulkan bahwa *leverage* yang rendah sekalipun akan memberikan dampak pada penurunan kinerja dikemudian hari dengan kewajiban pelunasan dan pembayaran bunga yang akan membebani pemerintah daerah tersebut.

6. *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada rasio efisiensi. Sedangkan untuk rasio efektivitas, *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka akan semakin besar pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas pertanggungjawaban dari dana yang telah diberikan. Sehingga hal ini otomatis akan membuat pemerintah daerah meningkatkan kinerjanya. Dari perbedaan hasil pada kedua model tersebut dapat disimpulkan bahwa yang terpenting adalah bukan seberapa besar dana yang diberikan kepada pemerintah daerah tetapi yang lebih penting adalah seberapa besar pengawasan yang diberikan oleh pemerintah pusat atas dana yang telah diberikannya tersebut.

## **5.2. Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang kedua yaitu kemakmuran (*wealth*) yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan juga untuk menghitung variabel dependennya yaitu kinerja

keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efektivitas. Hal ini terpaksa dilakukan karena sulitnya mencari proksi yang tepat dari kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah. Menurut Usman (1988) kemakmuran bersifat subjektif yang membuat pandangan masyarakat terhadap kemakmuran (*wealth*) berbeda, hal ini membuat pengukuran yang tepat dan baku terhadap kemakmuran sangat sulit.

### **5.3. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **5.3.1. Saran Bagi Pihak Pemerintah**

Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, pemerintah daerah di Jawa Tengah menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang kurang efisien dan sangat efektif, maka diharapkan:

1. Pemerintah daerah dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangannya sampai semaksimal mungkin sehingga mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal.
2. Pemerintah daerah dapat mengelola APBD dengan bijak untuk menciptakan efisiensi anggaran.
3. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sumber pendapatan utama daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

### **5.3.2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya**

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meninjau kinerja keuangan pemerintah daerah untuk provinsi-provinsi lain di Indonesia.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan proksi lain selain rasio efisiensi dan rasio efektivitas dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang diantaranya adalah rasio kemandirian dan rasio aktivitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2004. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan *Principal-Agent Theory*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Abdullah, Syukriy dan J.A. Asmara. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi *Agency Theory* di Sektor Publik. *Simposium Nasional Akuntansi* Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antar Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Procedding Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Azhar, Muhammad Karya Satya. 2008. Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. *Tesis Pascasarjana*. Universitas Sumatera Utara.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bisma, I Dewa Gde. dan Susanto, H. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal GaneC Swara Edisi Khusus*, 4 (3): 75-86.
- Cahyat, Ade. 2004. Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten. *Center for International Forestry Research*. Number 3.
- Choiriyah, Umi. 2010. *Information Gap* Pengungkapan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Cohen, Sandra dan Leventis, Stergios. 2010. 2006. "An Empirical Investigation of Audit Effort and Pricing in the Public Sector: The Case of Greek LGOs". SSRN November.
- Elmi, B. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greiling, Dorothea. 2005. *Performance Measuremen in the Public Sector: the German Experience*. *Internationa Journal of Productivity and Performance Managemen*, (Online), Vol. 54 Iss: 7.

(<http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1523669&show=abstract>, diakses pada 7 Desember 2014)

Halachmi, Arie. 2005. *Performance Measurement is Only One Way of Managing performance. International Journal of Productivity and Performance Management*. Vol. 54: 502-516.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Hamzah, Ardi. 2008. Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran, Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006). *Jurnal*. Madura: Universitas Trunojoyo Madura.

<http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/25/mltdq9-ini-10-kabupaten-dan-kota-daerah-otonomterbaik> (15 Agustus 2015)

<https://sakinatantri.wordpress.com/2012/10/17/pemerintah-abdi-ataukah-agen/> (18 Januari 2015)

<http://semarang.solopos.com/2014/10/19/pengelolaan-keuangan-daerah-efektivitas-keuangan-harus-jelas-545375> (15 Agustus 2015)

Indrawan, M. Yusuf. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar

Janur, Martha Yurdila. 2009. Analisis Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo Sesudah Otonomi Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara

Julitawati, Ebit. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 1. No 1.

Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh *Size*, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES

Mahsun, Mohammad. 2006. *Kinerja Sektor Pengukuran Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Mustikarini, Widya Astuti dan Fitasari, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi 15*.

- Patriati, Ratri. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Peraturan Pemerintah No. 24. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Perwitasari, Citra. 2010. *The Influence of Financial Performance to the Level of Accountability Disclosure of Indonesia's Local Government*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Puspitasari, Ayu Febriyanti. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol 1. No 2. Semester Genap 2012/2013
- Rukmana, Wan Widi. 2013. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Universitas Maritim Raja Ali
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business : "Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. Pengaruh *Leverage*, Ukuran Legislatif, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang
- Suhardjanto, D, Hartoko, Sri, Retnoningsih, Hilda, Rusmin, Mandasari, Putriesti and Brown, Alistair. 2010. *Influence of Parliament Characteristics toward Mandatory Accounting Disclosure Compliance in Indonesia*. Hibah Penelitian.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
- Surepno. 2013. Pengaruh *Return on Equity (ROE)*, Ukuran (*Size*) dan Kemakmuran (*Wealth*) Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Susanti, Asri Diah. 2010. *Demand Supply dan Praktik Social Disclosure di Indonesia*. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Tidak dipublikasi.

- Suyono. 2010. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Tesis*. Surakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret.
- Tambunan, Thulus T.H. 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Departemen Dalam Negeri RI, Jakarta [www.bapenas.go.id\(20Januari2012\)](http://www.bapenas.go.id/20Januari2012)
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Departemen Dalam Negeri RI, Jakarta. [www.bapenas.go.id\(20Januari2012\)](http://www.bapenas.go.id/20Januari2012)
- Weill, Laurent. 2003. *Leverage and Corporate Performance: A Frontier Efficiency Analysis on European Countries*. Working Paper. Working Paper Series. SSRN May.

## LAMPIRAN 1

**Data Size Pemerintah Daerah Tahun 2012**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAERAH</b>	<b>TOTAL ASET</b>	<b>LN (Total Aset)</b>
1	Kab. Banjarnegara	4.221.872.245.605,00	29,071
2	Kab. Banyumas	5.244.131.543.280,85	29,288
3	Kab. Batang	2.333.606.167.867,20	28,478
4	Kab. Cilacap	6.162.588.736.582,08	29,450
5	Kab. Grobogan	2.074.572.569.043,66	28,361
6	Kab. Jepara	4.236.475.735.636,48	29,075
7	Kab. Karanganyar	2.239.976.663.483,37	28,437
8	Kab. Kebumen	3.053.182.417.868,31	28,747
9	Kab. Magelang	2.344.709.229.722,00	28,483
10	Kab. Pati	1.690.494.458.072,76	28,156
11	Kab. Pekalongan	507.344.675.756,66	26,952
12	Kab. Pemasang	2.454.450.469.751,22	28,529
13	Kab. Purbalingga	1.664.451.838.389,00	28,141
14	Kab. Rembang	1.465.935.511.488,56	28,014
15	Kab. Semarang	1.989.953.748.604,37	28,319
16	Kab. Sukoharjo	1.598.754.200.438,20	28,100
17	Kab. Tegal	2.286.930.405.810,86	28,458
18	Kab. Wonogiri	2.937.724.847.073,66	28,709
19	Kota Magelang	2.021.018.590.283,62	28,335
20	Kota Semarang	6.644.954.951.540,00	29,525
21	Kota Surakarta	6.906.535.654.098,28	29,563
22	Kota Tegal	1.800.795.931.347,00	28,219



## LAMPIRAN 2

## Data Size Pemerintah Daerah Tahun 2013

NO	NAMA DAERAH	TOTAL ASET	LN (Total Aset)
1	Kab. Demak	2.657.255.675.110,72	28,608
2	Kab. Banjarnegara	2.974.824.342.784,00	28,721
3	Kab. Banyumas	5.718.535.365.232,63	29,375
4	Kab. Blora	2.301.203.417.899,10	28,464
5	Kab. Brebes	2.661.305.757.441,57	28,610
6	Kab. Cilacap	3.707.595.283.524,94	28,941
7	Kab. Grobogan	2.354.118.079.503,45	28,487
8	Kab. Jepara	4.359.767.928.375,73	29,103
9	Kab. Kebumen	3.261.629.442.888,98	28,813
10	Kab. Magelang	2.637.938.457.474,59	28,601
11	Kab. Pati	2.022.087.748.464,76	28,335
12	Kab. Pemasang	2.703.348.941.448,71	28,626
13	Kab. Purbalingga	1.735.062.051.934,00	28,182
14	Kab. Purworejo	2.198.204.188.183,72	28,419
15	Kab. Semarang	2.201.929.332.430,71	28,420
16	Kab. Sragen	2.362.868.977.611,20	28,491
17	Kab. Sukoharjo	1.877.777.633.224,66	28,261
18	Kab. Tegal	2.540.361.400.343,66	28,563
19	Kab. Temanggung	2.747.150.668.999,76	28,642
20	Kab. Wonogiri	3.815.167.723.143,29	28,970
21	Kota Magelang	2.123.402.967.041,75	28,384
22	Kota Pekalongan	2.238.972.857.341,62	28,437
23	Kota Salatiga	1.764.541.562.235,12	28,199
24	Kota Semarang	7.429.808.329.458,00	29,637
25	Kota Tegal	2.002.349.845.219,56	28,325

## LAMPIRAN 3

Data *Wealth* Pemerintah Daerah Tahun 2012

NO	NAMA DAERAH	WEALTH	LN (Wealth)
1	Kab. Banjarnegara	1.193.098.804.187,00	27,808
2	Kab. Banyumas	242.106.509.318,00	26,213
3	Kab. Batang	84.720.049.515,00	25,163
4	Kab. Cilacap	196.673.442.194,70	26,005
5	Kab. Grobogan	105.463.320.984,00	25,382
6	Kab. Jepara	129.076.570.089,00	25,584
7	Kab. Karanganyar	116.706.893.419,00	25,483
8	Kab. Kebumen	102.374.370.560,00	25,352
9	Kab. Magelang	123.722.781.349,00	25,541
10	Kab. Pati	163.733.665.531,00	25,822
11	Kab. Pekalongan	114.793.365.902,00	25,466
12	Kab. Pemasang	97.951.207.914,00	25,308
13	Kab. Purbalingga	112.755.698.257,00	25,448
14	Kab. Rembang	103.304.514.980,86	25,361
15	Kab. Semarang	156.104.007.119,31	25,774
16	Kab. Sukoharjo	164.954.318.824,00	25,829
17	Kab. Tegal	118.741.620.057,00	25,500
18	Kab. Wonogiri	100.037.192.306,00	25,329
19	Kota Magelang	91.314.601.697,00	25,238
20	Kota Semarang	779.616.535.593,00	27,382
21	Kota Surakarta	231.672.100.429,00	26,169
22	Kota Tegal	156.663.027.896,00	25,777

## LAMPIRAN 4

Data *Wealth* Pemerintah Daerah Tahun 2013

NO	NAMA DAERAH	WEALTH	LN (Wealth)
1	Kab. Demak	138.214.446.133,15	25,652
2	Kab. Banjarnegara	1.279.702.465.966,00	27,878
3	Kab. Banyumas	308.349.434.319,00	26,454
4	Kab. Blora	95.192.786.972,00	25,279
5	Kab. Brebes	133.836.336.686,00	25,620
6	Kab. Cilacap	278.507.545.940,69	26,353
7	Kab. Grobogan	143.586.365.567,00	25,690
8	Kab. Jepara	133.778.055.195,00	25,619
9	Kab. Kebumen	131.481.736.502,00	25,602
10	Kab. Magelang	173.253.651.914,00	25,878
11	Kab. Pati	169.127.415.979,00	25,854
12	Kab. Pemasang	136.362.281.618,00	25,639
13	Kab. Purbalingga	122.858.738.938,00	25,534
14	Kab. Purworejo	127.565.801.410,00	25,572
15	Kab. Semarang	215.679.554.472,00	26,097
16	Kab. Sragen	146.721.552.108,00	25,712
17	Kab. Sukoharjo	192.971.720.442,00	25,986
18	Kab. Tegal	156.244.859.788,00	25,775
19	Kab. Temanggung	102.080.197.094,00	25,349
20	Kab. Wonogiri	111.592.606.315,00	25,438
21	Kota Magelang	107.739.838.961,00	25,403
22	Kota Pekalongan	114.252.438.719,00	25,462
23	Kota Salatiga	106.100.450.499,00	25,388
24	Kota Semarang	925.919.310.506,00	27,554
25	Kota Tegal	176.377.335.075,00	25,896

## LAMPIRAN 5

**Data Leverage Tahun 2012**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAERAH</b>	<b>TOTAL HUTANG</b>	<b>TOTAL MODAL</b>	<b>LEVERAGE</b>
1	Kab. Banjarnegara	2.341.456.371,00	4.219.530.789.234,00	0,001
2	Kab. Banyumas	52.692.254.248,00	5.191.439.289.032,85	0,010
3	Kab. Batang	4.936.550.350,91	2.328.669.617.516,29	0,002
4	Kab. Cilacap	15.059.547.637,46	6.147.529.188.944,62	0,002
5	Kab. Grobogan	24.441.283.305,32	2.050.131.285.738,94	0,012
6	Kab. Jepara	15.606.929.306,00	4.220.868.806.330,48	0,004
7	Kab. Karanganyar	1.600.975.200,68	2.238.375.706.282,69	0,001
8	Kab. Kebumen	5.649.721.082,00	3.047.532.696.786,31	0,002
9	Kab. Magelang	4.449.158.370,65	2.340.260.071.352,03	0,002
10	Kab. Pati	0,00	1.690.494.458.072,76	0,000
11	Kab. Pekalongan	12.558.960.801,82	494.785.714.954,84	0,025
12	Kab. Pemasang	6.086.332.731,78	2.448.364.137.019,44	0,002
13	Kab. Purbalingga	17.414.947.817,00	1.903.578.373.331,00	0,009
14	Kab. Rembang	17.327.790.151,87	1.448.607.721.336,69	0,012
15	Kab. Semarang	4.379.654.174,31	1.985.574.094.430,06	0,002
16	Kab. Sukoharjo	401.206.226,07	1.598.352.994.212,13	0,000
17	Kab. Tegal	363.964.300,18	2.286.566.441.510,68	0,000
18	Kab. Wonogiri	4.411.112.905,00	2.933.313.734.168,66	0,002
19	Kota Magelang	1.775.711.365,00	2.019.242.878.918,62	0,001
20	Kota Semarang	17.418.836.563,00	6.627.536.114.977,00	0,003
21	Kota Surakarta	64.713.461.214,61	6.841.822.192.883,67	0,009
22	Kota Tegal	13.198.402.435,12	1.787.597.528.911,88	0,007

## LAMPIRAN 6

**Data Leverage Tahun 2013**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAERAH</b>	<b>TOTAL HUTANG</b>	<b>TOTAL MODAL</b>	<b>LEVERAGE</b>
1	Kab. Demak	7.237.877.068,70	2.650.017.798.042,02	0,003
2	Kab. Banjarnegara	2.977.986.096,00	2.971.846.356.652,00	0,001
3	Kab. Banyumas	57.996.124.052,00	5.660.539.241.180,63	0,010
4	Kab. Blora	4.838.946.890,68	2.296.364.471.008,42	0,002
5	Kab. Brebes	45.833.026.304,00	2.615.472.731.137,57	0,018
6	Kab. Cilacap	13.352.358.059,46	3.694.242.925.465,48	0,004
7	Kab. Grobogan	16.221.554.174,49	2.337.896.525.328,96	0,007
8	Kab. Jepara	16.951.346.571,00	4.342.816.581.804,73	0,004
9	Kab. Kebumen	6.351.419.670,00	3.255.278.023.218,98	0,002
10	Kab. Magelang	5.362.213.224,00	2.632.576.244.250,59	0,002
11	Kab. Pati	0,00	2.022.087.748.464,76	0,000
12	Kab. Pemasang	6.333.053.186,65	2.697.015.888.262,06	0,002
13	Kab. Purbalingga	14.502.846.795,00	2.108.400.590.714,00	0,007
14	Kab. Purworejo	12.281.930.627,00	2.185.922.257.556,72	0,006
15	Kab. Semarang	5.940.614.953,71	2.195.988.717.477,00	0,003
16	Kab. Sragen	11.215.903.716,00	2.351.653.073.895,20	0,005
17	Kab. Sukoharjo	272.796.658,54	1.877.504.836.566,12	0,000
18	Kab. Tegal	238.440.764,12	2.540.122.959.579,54	0,000
19	Kab. Temanggung	6.647.494.451,71	2.740.503.159.548,05	0,002
20	Kab. Wonogiri	4.444.018.196,00	3.810.723.704.947,29	0,001
21	Kota Magelang	1.985.140.402,00	2.121.417.826.639,75	0,001
22	Kota Pekalongan	7.565.721.752,00	2.231.407.135.589,62	0,003
23	Kota Salatiga	7.264.236.258,00	1.757.277.325.977,12	0,004
24	Kota Semarang	27.415.290.205,00	7.402.393.039.253,00	0,004
25	Kota Tegal	19.278.670.103,34	1.983.071.175.116,22	0,010

## LAMPIRAN 7

*Data Intergovernmental Revenue Tahun 2012*

<b>NO</b>	<b>NAMA DAERAH</b>	<b>Tot. DANA PERIMBANGAN</b>	<b>Tot. PENDAPATAN</b>	<b>IR</b>
1	Kab. Banjarnegara	794.742.431.657,00	1.193.098.804.187,00	0,666
2	Kab. Banyumas	1.197.890.395.039,00	1.536.899.701.236,00	0,779
3	Kab. Batang	677.708.142.613,00	933.943.656.710,00	0,726
4	Kab. Cilacap	1.250.042.117.132,00	1.792.439.254.840,70	0,697
5	Kab. Grobogan	976.816.606.098,00	1.323.837.610.516,00	0,738
6	Kab. Jepara	853.435.775.057,00	1.304.004.470.978,00	0,654
7	Kab. Karanganyar	837.078.139.710,00	1.228.675.436.010,00	0,681
8	Kab. Kebumen	1.056.314.659.838,00	1.446.685.447.262,00	0,730
9	Kab. Magelang	979.144.364.106,00	1.311.901.799.121,00	0,746
10	Kab. Pati	997.544.585.124,00	1.477.993.189.757,00	0,675
11	Kab. Pekalongan	790.944.567.807,00	1.114.533.218.906,00	0,710
12	Kab. Pemasang	965.594.332.210,00	1.433.382.614.412,00	0,674
13	Kab. Purbalingga	757.604.355.096,00	1.087.795.678.612,00	0,696
14	Kab. Rembang	692.398.154.559,00	1.017.711.677.635,86	0,680
15	Kab. Semarang	156.104.007.119,00	1.258.200.115.384,31	0,124
16	Kab. Sukoharjo	760.615.713.918,00	1.217.485.978.304,00	0,625
17	Kab. Tegal	990.985.676.819,00	1.354.747.858.729,00	0,731
18	Kab. Wonogiri	948.633.440.486,00	1.339.809.192.299,00	0,708
19	Kota Magelang	397.902.089.711,00	579.717.446.829,00	0,686
20	Kota Semarang	1.167.239.525.118,00	2.533.676.148.799,00	0,461
21	Kota Surakarta	710.269.783.706,00	1.239.451.422.517,00	0,573
22	Kota Tegal	394.762.935.687,00	650.805.263.874,00	0,607

## LAMPIRAN 8

*Data Intergovernmental Revenue Tahun 2013*

<b>NO</b>	<b>NAMA DAERAH</b>	<b>Tot. DANA PERIMBANGAN</b>	<b>Tot. PENDAPATAN</b>	<b>IR</b>
1	Kab. Demak	876.058.673.458,00	1.398.722.359.197,15	0,626
2	Kab. Banjarnegara	879.697.277.639,00	1.279.702.465.966,00	0,687
3	Kab. Banyumas	1.271.384.113.125,00	1.684.988.512.759,00	0,755
4	Kab. Blora	901.824.680.069,00	1.292.799.169.613,00	0,698
5	Kab. Brebes	1.248.282.453.909,00	1.781.873.278.077,00	0,701
6	Kab. Cilacap	1.384.770.341.881,00	2.121.355.398.612,69	0,653
7	Kab. Grobogan	1.074.895.578.793,00	1.549.709.105.117,00	0,694
8	Kab. Jepara	938.844.273.033,00	1.386.691.761.062,00	0,677
9	Kab. Kebumen	1.135.499.305.803,00	1.626.530.654.021,00	0,698
10	Kab. Magelang	986.615.535.111,00	1.428.243.260.343,00	0,691
11	Kab. Pati	1.094.864.463.993,00	1.706.030.888.000,00	0,642
12	Kab. Pemasang	1.029.201.574.058,00	1.486.773.783.371,00	0,692
13	Kab. Purbalingga	830.569.180.496,00	1.186.532.497.797,00	0,700
14	Kab. Purworejo	880.733.786.903,00	1.289.037.659.296,00	0,683
15	Kab. Semarang	215.679.554.472,00	1.373.383.023.313,00	0,157
16	Kab. Sragen	974.779.878.909,00	1.468.966.588.879,00	0,664
17	Kab. Sukoharjo	844.525.645.286,00	1.365.641.177.393,00	0,618
18	Kab. Tegal	1.071.845.030.550,00	1.574.068.555.274,00	0,681
19	Kab. Temanggung	743.027.752.791,00	1.053.845.571.760,00	0,705
20	Kab. Wonogiri	1.039.362.677.425,00	1.489.307.551.589,00	0,698
21	Kota Magelang	431.113.288.290,00	634.759.985.140,00	0,679
22	Kota Pekalongan	450.219.878.779,00	675.375.467.702,00	0,667
23	Kota Salatiga	403.863.968.133,00	603.204.201.915,00	0,670
24	Kota Semarang	1.191.097.532.757,00	2.796.570.726.860,00	0,426
25	Kota Tegal	430.499.302.526,00	723.968.861.085,00	0,595

## LAMPIRAN 9

**Data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  
dengan Rasio Efisiensi Tahun 2012**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAERAH</b>	<b>REALISASI PENGELUARAN</b>	<b>REALISASI PENERIMAAN</b>	<b>EFISIENSI</b>
1	Kab. Banjarnegara	1.111.145.362.420,00	1.193.098.804.187,00	0,931
2	Kab. Banyumas	1.732.236.268.164,00	1.815.453.435.554,00	0,954
3	Kab. Batang	900.205.033.365,00	933.943.656.710,00	0,964
4	Kab. Cilacap	1.792.586.828.800,00	1.792.439.254.840,70	1,000
5	Kab. Grobogan	1.203.540.602.867,00	1.323.837.610.516,00	0,909
6	Kab. Jepara	1.297.076.712.359,00	1.304.004.470.978,00	0,995
7	Kab. Karanganyar	1.173.205.689.050,00	1.228.675.436.010,00	0,955
8	Kab. Kebumen	1.412.496.990.997,00	1.446.685.447.262,00	0,976
9	Kab. Magelang	1.146.500.040.357,00	1.311.901.799.121,00	0,874
10	Kab. Pati	1.425.840.271.105,00	1.477.993.189.757,00	0,965
11	Kab. Pekalongan	1.007.758.469.920,00	1.114.533.218.906,00	0,904
12	Kab. Pemasang	1.196.452.995.116,00	1.433.382.614.412,00	0,835
13	Kab. Purbalingga	1.084.087.067.123,00	1.087.795.678.612,00	0,997
14	Kab. Rembang	969.132.236.253,00	1.017.711.677.635,86	0,952
15	Kab. Semarang	1.215.522.162.545,52	1.258.200.115.284,31	0,966
16	Kab. Sukoharjo	1.196.799.260.947,00	1.217.485.978.304,00	0,983
17	Kab. Tegal	1.347.362.420.550,00	1.354.747.858.729,00	0,995
18	Kab. Wonogiri	1.325.195.586.897,00	1.339.809.192.299,00	0,989
19	Kota Magelang	536.348.689.402,00	579.717.446.829,00	0,925
20	Kota Semarang	2.053.334.797.225,00	2.533.676.148.799,00	0,810
21	Kota Surakarta	1.145.170.897.101,00	1.239.451.422.517,00	0,924
22	Kota Tegal	586.687.294.770,00	650.805.263.874,00	0,901



**LAMPIRAN 10****Data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  
dengan Rasio Efisiensi Tahun 2013**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAERAH</b>	<b>REALISASI PENGELUARAN</b>	<b>REALISASI PENERIMAAN</b>	<b>EFISIENSI</b>
1	Kab. Demak	1.338.417.925.609,00	1.398.722.359.197,15	0,957
2	Kab. Banjarnegara	1.175.474.028.855,00	1.279.702.465.966,00	0,919
3	Kab. Banyumas	2.018.052.963.730,00	2.073.636.075.236,00	0,973
4	Kab. Blora	1.318.484.054.214,00	1.292.799.169.613,00	1,020
5	Kab. Brebes	1.661.266.202.697,00	1.781.873.278.077,00	0,932
6	Kab. Cilacap	2.047.162.545.621,44	2.121.355.398.612,69	0,965
7	Kab. Grobogan	1.507.949.202.417,00	1.549.709.105.117,00	0,973
8	Kab. Jepara	1.351.530.902.258,00	1.386.691.761.062,00	0,975
9	Kab. Kebumen	1.548.176.706.140,00	1.626.530.654.021,00	0,952
10	Kab. Magelang	1.258.155.351.177,00	1.428.243.260.343,00	0,881
11	Kab. Pati	1.653.021.493.160,00	1.706.030.888.000,00	0,969
12	Kab. Pemasang	1.477.106.031.341,00	1.486.773.783.371,00	0,993
13	Kab. Purbalingga	1.126.557.032.701,00	1.186.532.497.797,00	0,949
14	Kab. Purworejo	1.204.862.645.824,00	1.289.037.659.296,00	0,935
15	Kab. Semarang	1.333.537.783.262,07	1.373.383.023.313,00	0,971
16	Kab. Sragen	1.408.595.385.453,00	1.468.966.588.879,00	0,959
17	Kab. Sukoharjo	1.281.648.110.545,00	1.365.641.177.393,00	0,938
18	Kab. Tegal	1.531.862.423.082,00	1.574.068.555.274,00	0,973
19	Kab. Temanggung	1.000.841.225.195,00	1.053.845.571.760,00	0,950
20	Kab. Wonogiri	1.449.245.447.657,00	1.489.307.551.589,00	0,973
21	Kota Magelang	630.850.717.357,00	634.759.985.140,00	0,994
22	Kota Pekalongan	664.175.351.720,00	675.375.467.702,00	0,983
23	Kota Salatiga	529.237.634.485,00	603.204.201.915,00	0,877
24	Kota Semarang	2.473.490.609.437,00	2.796.570.726.860,00	0,884
25	Kota Tegal	673.040.144.370,00	723.968.861.085,00	0,930

## LAMPIRAN 11

**Data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  
dengan Rasio Efektivitas Tahun 2012**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAERAH</b>	<b>REALISASI PENERIMAAN PAD</b>	<b>TARGET PENERIMAAN PAD</b>	<b>EFEKTIVITAS</b>
1	Kab. Banjarnegara	94.271.467.989,00	77.716.593.000,00	1,213
2	Kab. Banyumas	242.106.509.318,00	213.937.876.072,00	1,132
3	Kab. Batang	84.720.049.515,00	75.160.471.498,00	1,127
4	Kab. Cilacap	196.673.442.194,70	174.354.207.000,00	1,128
5	Kab. Grobogan	105.463.320.984,00	88.139.303.000,00	1,197
6	Kab. Jepara	129.076.570.089,00	113.150.581.000,00	1,141
7	Kab. Karanganyar	116.706.893.419,00	100.389.969.000,00	1,163
8	Kab. Kebumen	102.374.370.560,00	90.896.840.000,00	1,126
9	Kab. Magelang	123.722.781.349,00	107.064.480.721,00	1,156
10	Kab. Pati	163.733.665.531,00	140.295.358.000,00	1,167
11	Kab. Pekalongan	114.793.365.902,00	108.326.763.424,00	1,060
12	Kab. Pemasang	97.951.207.914,00	81.821.872.000,00	1,197
13	Kab. Purbalingga	112.755.698.257,00	99.276.751.000,00	1,136
14	Kab. Rembang	103.304.514.980,86	95.041.791.800,00	1,087
15	Kab. Semarang	156.104.007.119,31	148.515.954.000,00	1,051
16	Kab. Sukoharjo	164.954.318.824,00	141.669.442.000,00	1,164
17	Kab. Tegal	118.471.620.057,00	101.490.408.000,00	1,167
18	Kab. Wonogiri	100.037.192.306,00	81.980.097.949,00	1,220
19	Kota Magelang	91.314.601.697,00	82.457.388.000,00	1,107
20	Kota Semarang	779.616.535.593,00	667.883.642.000,00	1,167
21	Kota Surakarta	231.672.100.429,00	192.902.940.603,00	1,201
22	Kota Tegal	156.663.027.896,00	141.197.585.000,00	1,110

## LAMPIRAN 12

**Data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  
dengan Rasio Efektivitas Tahun 2013**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAERAH</b>	<b>REALISASI PENERIMAAN PAD</b>	<b>TARGET PENERIMAAN PAD</b>	<b>EFEKTIVITAS</b>
1	Kab. Demak	138.214.446.133,15	118.719.459.000,00	1,164
2	Kab. Banjarnegara	98.975.318.350,00	88.557.495.000,00	1,118
3	Kab. Banyumas	308.349.434.319,00	269.886.824.932,00	1,143
4	Kab. Blora	95.192.786.972,00	78.000.000.000,00	1,220
5	Kab. Brebes	133.836.336.686,00	124.303.523.000,00	1,077
6	Kab. Cilacap	278.507.545.940,69	242.417.739.000,00	1,149
7	Kab. Grobogan	143.586.365.567,00	122.352.386.000,00	1,174
8	Kab. Jepara	133.778.055.195,00	118.924.090.000,00	1,125
9	Kab. Kebumen	131.481.736.502,00	116.720.489.000,00	1,126
10	Kab. Magelang	173.253.651.914,00	144.476.275.479,00	1,199
11	Kab. Pati	169.127.415.979,00	146.251.857.000,00	1,156
12	Kab. Pemasang	136.362.281.618,00	117.177.974.000,00	1,164
13	Kab. Purbalingga	122.858.738.938,00	112.298.239.000,00	1,094
14	Kab. Purworejo	127.565.801.410,00	117.987.260.849,00	1,081
15	Kab. Semarang	215.679.554.472,00	202.416.501.000,00	1,066
16	Kab. Sragen	146.721.552.108,00	127.042.479.000,00	1,155
17	Kab. Sukoharjo	192.971.720.442,00	170.463.178.000,00	1,132
18	Kab. Tegal	156.244.859.788,00	136.733.165.000,00	1,143
19	Kab. Temanggung	102.080.197.094,00	91.966.542.000,00	1,110
20	Kab. Wonogiri	111.592.606.315,00	101.229.939.355,00	1,102
21	Kota Magelang	107.739.838.961,00	96.302.877.000,00	1,119
22	Kota Pekalongan	114.252.438.719,00	93.853.722.000,00	1,217
23	Kota Salatiga	106.100.450.499,00	87.723.650.000,00	1,209
24	Kota Semarang	925.919.310.506,00	778.866.930.000,00	1,189
25	Kota Tegal	176.377.335.075,00	160.596.472.000,00	1,098

## LAMPIRAN 13

**Data Variabel Independen dan Variabel Dependen  
Tahun 2012 dan 2013**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAERAH</b>	<b>SIZE</b>	<b>WLTH</b>	<b>LEV</b>	<b>IR</b>	<b>EFI</b>	<b>EFEK</b>
1	Kab. Banjarnegara	29,071	27,808	0,001	0,666	0,931	1,213
2	Kab. Banyumas	29,288	26,213	0,010	0,779	0,954	1,132
3	Kab. Batang	28,478	25,163	0,002	0,726	0,964	1,127
4	Kab. Cilacap	29,450	26,005	0,002	0,697	1,000	1,128
5	Kab. Grobogan	28,361	25,382	0,012	0,738	0,909	1,197
6	Kab. Jepara	29,075	25,584	0,004	0,654	0,995	1,141
7	Kab. Karanganyar	28,437	25,483	0,001	0,681	0,955	1,163
8	Kab. Kebumen	28,747	25,352	0,002	0,730	0,976	1,126
9	Kab. Magelang	28,483	25,541	0,002	0,746	0,874	1,156
10	Kab. Pati	28,156	25,822	0,000	0,675	0,965	1,167
11	Kab. Pekalongan	26,952	25,466	0,025	0,710	0,904	1,060
12	Kab. Pemasang	28,529	25,308	0,002	0,674	0,835	1,197
13	Kab. Purbalingga	28,141	25,448	0,009	0,696	0,997	1,136
14	Kab. Rembang	28,014	25,361	0,012	0,680	0,952	1,087
15	Kab. Semarang	28,319	25,774	0,002	0,124	0,966	1,051
16	Kab. Sukoharjo	28,100	25,829	0,000	0,625	0,983	1,164
17	Kab. Tegal	28,458	25,500	0,000	0,731	0,995	1,167
18	Kab. Wonogiri	28,709	25,329	0,002	0,708	0,989	1,220
19	Kota Magelang	28,335	25,238	0,001	0,686	0,925	1,107
20	Kota Semarang	29,525	27,382	0,003	0,461	0,810	1,167
21	Kota Surakarta	29,563	26,169	0,009	0,573	0,924	1,201
22	Kota Tegal	28,219	25,777	0,007	0,607	0,901	1,110
23	Kab. Demak	28,608	25,652	0,003	0,626	0,957	1,164
24	Kab. Banjarnegara	28,721	27,878	0,001	0,687	0,919	1,118
25	Kab. Banyumas	29,375	26,454	0,010	0,755	0,973	1,143
26	Kab. Blora	28,464	25,279	0,002	0,698	1,020	1,220
27	Kab. Brebes	28,610	25,620	0,018	0,701	0,932	1,077
28	Kab. Cilacap	28,941	26,353	0,004	0,653	0,965	1,149
29	Kab. Grobogan	28,487	25,690	0,007	0,694	0,973	1,174
30	Kab. Jepara	29,103	25,619	0,004	0,677	0,975	1,125
31	Kab. Kebumen	28,813	25,602	0,002	0,698	0,952	1,126
32	Kab. Magelang	28,601	25,878	0,002	0,691	0,881	1,199
33	Kab. Pati	28,335	25,854	0,000	0,642	0,969	1,156
34	Kab. Pemasang	28,626	25,639	0,002	0,692	0,993	1,164

<b>NO</b>	<b>NAMA DAERAH</b>	<b>SIZE</b>	<b>WLTH</b>	<b>LEV</b>	<b>IR</b>	<b>EFI</b>	<b>EFEK</b>
35	Kab. Purbalingga	28,182	25,534	0,007	0,700	0,949	1,094
36	Kab. Purworejo	28,419	25,572	0,006	0,683	0,935	1,081
37	Kab. Semarang	28,420	26,097	0,003	0,157	0,971	1,066
38	Kab. Sragen	28,491	25,712	0,005	0,664	0,959	1,155
39	Kab. Sukoharjo	28,261	25,986	0,000	0,618	0,938	1,132
40	Kab. Tegal	28,563	25,775	0,000	0,681	0,973	1,143
41	Kab. Temanggung	28,642	25,349	0,002	0,705	0,950	1,110
42	Kab. Wonogiri	28,970	25,438	0,001	0,698	0,973	1,102
43	Kota Magelang	28,384	25,403	0,001	0,679	0,994	1,119
44	Kota Pekalongan	28,437	25,462	0,003	0,667	0,983	1,217
45	Kota Salatiga	28,199	25,388	0,004	0,670	0,877	1,209
46	Kota Semarang	29,637	27,554	0,004	0,426	0,884	1,189
47	Kota Tegal	28,325	25,896	0,010	0,595	0,930	1,098

## LAMPIRAN 14

**Detail Kategori Efisiensi dan Efektivitas  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2012**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAERAH</b>	<b>EFISIENSI</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>EFEKTIVITAS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Kab. Banjarnegara	0,931	Kurang Efisien	1,213	Sangat Efektif
2	Kab. Banyumas	0,954	Kurang Efisien	1,132	Sangat Efektif
3	Kab. Batang	0,964	Kurang Efisien	1,127	Sangat Efektif
4	Kab. Cilacap	1,000	Tidak Efisien	1,128	Sangat Efektif
5	Kab. Grobogan	0,909	Kurang Efisien	1,197	Sangat Efektif
6	Kab. Jepara	0,995	Kurang Efisien	1,141	Sangat Efektif
7	Kab. Karanganyar	0,955	Kurang Efisien	1,163	Sangat Efektif
8	Kab. Kebumen	0,976	Kurang Efisien	1,126	Sangat Efektif
9	Kab. Magelang	0,874	Cukup Efisien	1,156	Sangat Efektif
10	Kab. Pati	0,965	Kurang Efisien	1,167	Sangat Efektif
11	Kab. Pekalongan	0,904	Kurang Efisien	1,060	Sangat Efektif
12	Kab. Pemasang	0,835	Cukup Efisien	1,197	Sangat Efektif
13	Kab. Purbalingga	0,997	Kurang Efisien	1,136	Sangat Efektif
14	Kab. Rembang	0,952	Kurang Efisien	1,087	Sangat Efektif
15	Kab. Semarang	0,966	Kurang Efisien	1,051	Sangat Efektif
16	Kab. Sukoharjo	0,983	Kurang Efisien	1,164	Sangat Efektif
17	Kab. Tegal	0,995	Kurang Efisien	1,167	Sangat Efektif
18	Kab. Wonogiri	0,989	Kurang Efisien	1,220	Sangat Efektif
19	Kota Magelang	0,925	Kurang Efisien	1,107	Sangat Efektif
20	Kota Semarang	0,810	Cukup Efisien	1,167	Sangat Efektif
21	Kota Surakarta	0,924	Kurang Efisien	1,201	Sangat Efektif
22	Kota Tegal	0,901	Kurang Efisien	1,110	Sangat Efektif

## LAMPIRAN 15

**Detail Kategori Efisiensi dan Efektivitas  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2013**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAERAH</b>	<b>EFISIENSI</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>EFEKTIVITAS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Kab. Demak	0,957	Kurang Efisien	1,164	Sangat Efektif
2	Kab. Banjarnegara	0,919	Kurang Efisien	1,118	Sangat Efektif
3	Kab. Banyumas	0,973	Kurang Efisien	1,143	Sangat Efektif
4	Kab. Blora	1,020	Tidak Efisien	1,220	Sangat Efektif
5	Kab. Brebes	0,932	Kurang Efisien	1,077	Sangat Efektif
6	Kab. Cilacap	0,965	Kurang Efisien	1,149	Sangat Efektif
7	Kab. Grobogan	0,973	Kurang Efisien	1,174	Sangat Efektif
8	Kab. Jepara	0,975	Kurang Efisien	1,125	Sangat Efektif
9	Kab. Kebumen	0,952	Kurang Efisien	1,126	Sangat Efektif
10	Kab. Magelang	0,881	Cukup Efisien	1,199	Sangat Efektif
11	Kab. Pati	0,969	Kurang Efisien	1,156	Sangat Efektif
12	Kab. Pemasang	0,993	Kurang Efisien	1,164	Sangat Efektif
13	Kab. Purbalingga	0,949	Kurang Efisien	1,094	Sangat Efektif
14	Kab. Purworejo	0,935	Kurang Efisien	1,081	Sangat Efektif
15	Kab. Semarang	0,971	Kurang Efisien	1,066	Sangat Efektif
16	Kab. Sragen	0,959	Kurang Efisien	1,155	Sangat Efektif
17	Kab. Sukoharjo	0,938	Kurang Efisien	1,132	Sangat Efektif
18	Kab. Tegal	0,973	Kurang Efisien	1,143	Sangat Efektif
19	Kab. Temanggung	0,950	Kurang Efisien	1,110	Sangat Efektif
20	Kab. Wonogiri	0,973	Kurang Efisien	1,102	Sangat Efektif
21	Kota Magelang	0,994	Kurang Efisien	1,119	Sangat Efektif
22	Kota Pekalongan	0,983	Kurang Efisien	1,217	Sangat Efektif
23	Kota Salatiga	0,877	Cukup Efisien	1,209	Sangat Efektif
24	Kota Semarang	0,884	Cukup Efisien	1,189	Sangat Efektif
25	Kota Tegal	0,930	Kurang Efisien	1,098	Sangat Efektif

## LAMPIRAN 16

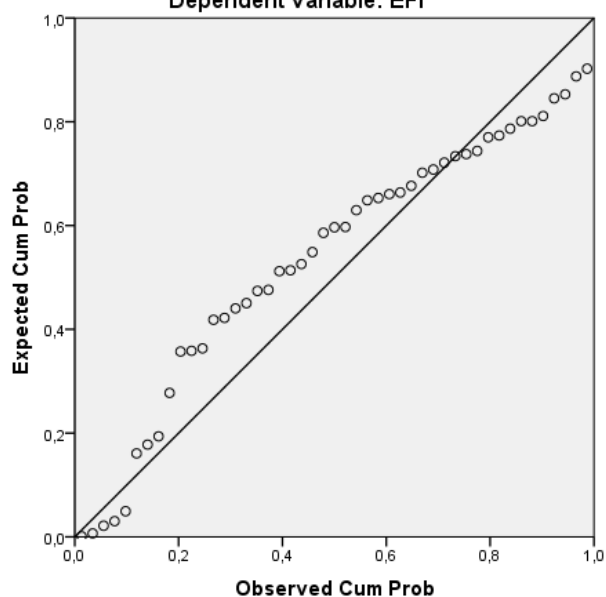
## Hasil Output SPSS

## Model 1 – Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Rasio Efisiensi)

## Grafik Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: EFI



### Hasil Uji Normalitas Model 1

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		47
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04028079
	Absolute	,159
Most Extreme Differences	Positive	,093
	Negative	-,159
Kolmogorov-Smirnov Z		1,091
Asymp. Sig. (2-tailed)		,185

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



### Hasil Uji Multikolinearitas Model 1 Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SIZE	,665	1,503
	WLTH	,660	1,515
	LEV	,902	1,109
	IR	,890	1,123

a. Dependent Variable: EFI

### Hasil Uji Autokorelasi Model 1 Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	,01030
Cases < Test Value	23
Cases >= Test Value	24
Total Cases	47
Number of Runs	22
Z	-,587
Asymp. Sig. (2-tailed)	,557

a. Median

### Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1 Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		(Constant)	-,113	,261		
1	SIZE	,005	,010	,094	,508	,614
	WLTH	6,826E-006	,008	,000	,001	,999
	LEV	-,934	,863	-,171	-1,082	,285
	IR	-,008	,035	-,038	-,240	,812

a. Dependent Variable: ABS

**Hasil Regresi Model 1**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,359	,397		3,424	,001
1 SIZE	,010	,016	,107	,615	,542
WLTH	-,027	,012	-,389	-2,236	,031
LEV	-1,697	1,311	-,193	-1,295	,202
IR	,014	,053	,040	,266	,791

a. Dependent Variable: EFI

**Hasil Uji Statistik t Model 1**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,359	,397		3,424	,001
1 SIZE	,010	,016	,107	,615	,542
WLTH	-,027	,012	-,389	-2,236	,031
LEV	-1,697	1,311	-,193	-1,295	,202
IR	,014	,053	,040	,266	,791

a. Dependent Variable: EFI

**Hasil Uji Simultan F Model 1**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,014	4	,004	2,034	,107 <sup>b</sup>
Residual	,075	42	,002		
Total	,089	46			

a. Dependent Variable: EFI

b. Predictors: (Constant), IR, SIZE, LEV, WLTH

### Hasil Koefisien Determinasi Model 1

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,403 <sup>a</sup>	,162	,082	,04216	1,936

a. Predictors: (Constant), IR, SIZE, LEV, WLTH

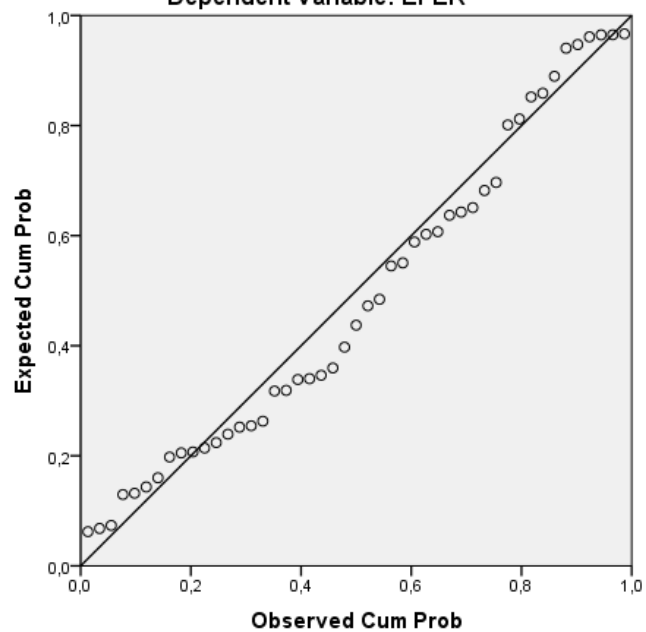
b. Dependent Variable: EFI

### Model 2 – Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Rasio Efektivitas)

#### Grafik Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: EFEK



**Hasil Uji Normalitas Model 2**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		47
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,03780951
	Absolute	,115
Most Extreme Differences	Positive	,115
	Negative	-,076
Kolmogorov-Smirnov Z		,785
Asymp. Sig. (2-tailed)		,568

a. Test distribution is Normal.

**Hasil Uji Multikolinearitas Model 2**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SIZE	,665	1,503
	WLTH	,660	1,515
	LEV	,902	1,109
	IR	,890	1,123

a. Dependent Variable: EFEK

**Hasil Uji Autokorelasi Model 2**  
**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,00624
Cases < Test Value	23
Cases >= Test Value	24
Total Cases	47
Number of Runs	24
Z	,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

a. Median

### Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	-,167	,198			
1	SIZE	,012	,008	,281	1,538	,132
	WLTH	-,006	,006	-,184	-1,004	,321
	LEV	-,050	,653	-,012	-,076	,939
	IR	,010	,026	,060	,383	,704

a. Dependent Variable: ABS

### Hasil Regresi Model 2

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	,398	,372			
1	SIZE	,016	,015	,177	1,100	,278
	WLTH	,008	,011	,116	,718	,477
	LEV	-2,909	1,230	-,327	-2,365	,023
	IR	,127	,049	,358	2,574	,014

a. Dependent Variable: EFEK

### Hasil Uji Statistik t Model 2

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	,398	,372			
1	SIZE	,016	,015	,177	1,100	,278
	WLTH	,008	,011	,116	,718	,477
	LEV	-2,909	1,230	-,327	-2,365	,023
	IR	,127	,049	,358	2,574	,014

a. Dependent Variable: EFEK

### Hasil Uji Simultan F Model 2

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,025	4	,006	4,035	,007 <sup>b</sup>
	Residual	,066	42	,002		
	Total	,091	46			

a. Dependent Variable: EFEK

b. Predictors: (Constant), IR, SIZE, LEV, WLTH

### Hasil Koefisien Determinasi Model 2

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,527 <sup>a</sup>	,278	,209	,03957	1,912

a. Predictors: (Constant), IR, SIZE, LEV, WLTH

b. Dependent Variable: EFEK